



HIBRIDITAS, MIMIKRI, DAN AMBIVALENSI DALAM BUKU KUMPULAN CERPEN BERBURU BUAYA DI HINDIA TIMUR KARYA RISDA NUR WIDIA

Bella Berliana¹⁾, Diah Rahma Cahya Agustyowati²⁾

¹SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta
email: bellaberliana@gmail.com

²Prodi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Sebelas Maret
email: diahrahma@student.uns.ac.id

DOI: [10.23917/ks.v8i1.18891](https://doi.org/10.23917/ks.v8i1.18891)

Received: June 28th, 2022. Revised: July 23th, 2023. Accepted: May 10th, 2023
Available Online: May 20th, 2023. Published Regularly: May 20th, 2023

Abstract

The purpose of this study is to describe the forms of hybridity, mimicry, and ambivalence that are presented in the book collection of short stories Berburu Buaya di Hindia Timur by Risda Nur Widia. This research is classified as a qualitative descriptive study with a postcolonial approach. The data collection technique used is qualitative analysis of literary works documents. The data analysis process is carried out through three stages, namely: (1) data reduction, selecting the data that has been collected and classifying it into predetermined categories; (2) presenting data, describing and analyzing each data; and (3) conclusion, giving a conclusion to the data that has been analyzed. The results show that there are seven forms of hybridity which include: (1) language, (2) education, (3) mindset, (4) belief, (5) court system, (6) lifestyle, and (7) lifestyle tools. . Furthermore, five forms of mimicry were also found which include: (1) means of payment, (2) the tax system, (3) weapons, (4) naming places, and (5) cooking spices. Meanwhile, there are two forms of ambivalence, namely: (1) concubines and (2) looks.

Keywords: *hybridity, mimicry, ambivalence, postcolonialism*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk hibriditas, mimikri, dan ambivalensi yang terpresentasi dalam buku kumpulan cerpen *Berburu Buaya di Hindia Timur* karya Risda Nur Widia. Penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan poskolonialisme. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif terhadap dokumen karya sastra. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu meliputi: (1) reduksi data, menyeleksi data-data yang telah terkumpul dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori-kategori yang telah ditentukan; (2) penyajian data, mendeskripsikan dan menganalisis setiap data; dan (3) penarikan simpulan, memberikan simpulan terhadap data-data yang telah dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh bentuk hibriditas yang meliputi: (1) bahasa, (2) pendidikan, (3) pola pikir, (4) kepercayaan, (5) sistem pengadilan, (6) gaya hidup, dan (7) peralatan hidup. Lebih lanjut, ditemukan juga lima bentuk mimikri yang meliputi: (1) alat pembayaran, (2) sistem pajak, (3) senjata, (4) penamaan tempat, dan (5) bumbu dapur. Sementara itu, terdapat dua bentuk

ambivalensi yaitu: (1) pergundikan dan (2) penghinaan.

Kata kunci: hibriditas, mimikri, ambivalensi, poskolonialisme

How to Cite: Berliana, B., & D.R.C. Agustyowati. Hibriditas, Mimikri dan Ambivalensi dalam Buku Kumpulan Cerpen *Berburu Buaya di Hindia* Karya Risda Nur Widia. *Kajian Linguistik dan Sastra*, Vol.8 (1), pp.24-45.

Corresponding Author:

Bella Berliana, SD Muhammadiyah Program Khusus Kottabarat Surakarta
Email: bellaberliana969@gmail.com

1. Pendahuluan

Letak geografis Indonesia yang strategis menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam. Hal itu, kemudian menarik bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol, Perancis, Inggris, dan Belanda untuk menguasai bangsa Indonesia. Penguasaan bangsa Indonesia oleh bangsa Barat disebut sebagai kolonialisme. Loomba (2003) mendefinisikan kolonialisme sebagai suatu bentuk dominasi yang berlandaskan pada keyakinan bahwa bangsa koloni lebih rendah dari bangsa kolonial. Adanya bentuk kolonialisme ditandai dengan penguasaan atau penaklukan masyarakat asli oleh masyarakat pendatang sehingga melahirkan perbudakan dan penjajahan. Sementara itu, Farhana RM dan Aflahah (2019) menyatakan bahwa kolonialisme adalah bentuk penaklukan dan penindasan terhadap masyarakat yang menjadi koloni.

Praktik kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat adalah rangkaian nafsu untuk menguasai bangsa koloni dalam berbagai bidang kehidupan. Kartodirjo (1990) berpendapat bahwa kolonialisme dipicu oleh adanya penguasaan faktor ekonomi, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa faktor agama, politik, dan sebagainya juga menjadi faktor penyebab kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat. Sejalan dengan itu, Kirom (2020) juga mengungkapkan bahwa praktik kolonialisme yang dilakukan bangsa Barat terjadi pada berbagai aspek yaitu meliputi: sosial, ekonomi, politik, budaya, bahkan agama.

Masa kolonialisme yang dialami bangsa Indonesia terjadi sekitar 350 tahun lamanya. Sejarah kolonialisme tersebut bagian dari pengalaman pahit yang menimpa rakyat Indonesia. Sebab, bangsa kolonial telah banyak menyengsarakan kehidupan rakyat pribumi. Zed (2017) berpendapat bahwa kolonialisme telah memiskinkan dan merampas hak bangsa Indonesia untuk melakukan transformasi dan pembangunan ekonomi secara mandiri. Selain itu, menurut Wardani dan Widyahening (2020), kolonialisme di Indonesia tidak hanya sebagai suatu hegemoni ekonomi dan politik bangsa kolonial, namun juga dilakukan dengan cara dominasi dengan eksploitasi dan kekerasan yang tidak memanusiakan manusia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kasus penindasan, genosida, dan perbudakan yang dilakukan oleh bangsa kolonial terhadap bangsa koloni.

Peristiwa kolonialisme yang terjadi di Indonesia banyak menjadi sumber inspirasi bagi

para sastrawan dalam berolah sastra. Endraswara (2008) mengemukakan bahwa karya sastra pada dasarnya akan mengungkap suatu kejadian. Namun, kejadian tersebut bukan sebagai fakta yang sesungguhnya, tetapi telah diolah dengan fakta mental pencipta. Pencipta sastra berupaya untuk mengolah halus fakta objektif menggunakan daya imajinasi, sehingga tercipta fakta mental imajinatif. Menurut Wuryani (2013), karya sastra seringkali mengungkap tentang realita kehidupan manusia. Tetapi, dalam proses penciptaannya telah melibatkan daya imajinasi dan kreativitas yang dimiliki oleh para sastrawan. Sastrawan biasanya melakukan proses pengamatan dan penghayatan terhadap beragam persoalan kehidupan, kemudian mengekspresikannya melalui sarana bahasa yang berbentuk cerpen, puisi, drama, novel, dan lain-lain.

Hadirnya karya sastra yang merepresentasikan berbagai peristiwa kolonialisme dapat dikaji dengan pendekatan poskolonialisme. Teori poskolonialisme lahir sebagai kritik terhadap budaya kolonial atau imperialism. Young (2001) menyatakan bahwa teori poskolonial berkaitan dengan sejarah kolonialisme. Ashcroft, dkk (2003: 83) mengungkapkan bahwa teori poskolonial sebagai tulisan yang berkaitan dengan pengalaman kolonial. Poskolonialisme tidak hanya digunakan dalam memperkuat kesadaran individu, melainkan juga digunakan dalam mengatasi krisis yang terjadi akibat adanya bentuk kolonialisme.

Schwarz & Ray (2005) mengemukakan bahwa studi poskolonial adalah suatu bidang kajian yang menggambarkan adanya gerakan-gerakan pembebasan nasional atau mengakhiri dominasi atas suatu negara. Sementara itu, Lampert-Weissig (2010) mengatakan bahwa pendekatan poskolonial menantang dunia barat, paradigma sementara, dan mengkritik hegemoni budaya atau ketidaksetaraan. Di samping itu, poskolonialisme lahir akibat runtuhnya kolonialisme yang memunculkan kesadaran individu dan kemerdekaan dari hegemoni (Furqon & Busro, 2020).

Penelitian sastra yang mengangkat isu kolonialisme telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Al Kautsar (2020) mengkaji jejak kolonial dalam kumpulan cerpen berjudul *Teh dan Penghianat karya Iksaka Banu*. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa jejak-jejak kolonial itu berupa hibriditas, mimikri, dan ambivalensi. Bentuk hibriditas meliputi: (1) tirani kolonial dan budaya Pribumi; (2) menjustifikasi pernyataan “darah campuran itu terkutuk” bagi kolonial; (3) kolonialisme tidak selalu jahat kepada pribumi, dan (4) pribumi tidak selalu baik dan ramah. Lebih lanjut, bentuk-bentuk mimikri terdiri atas: (1) cara berpakaian dan busana yang dikenakan; dan (2) cara kebahasaan dengan menguasai bahasa asing. Sementara ambivalensi yang terjadi yaitu: (1) membela pribumi dari kebengisan kolonial; dan (2) menerobos larangan kolonialisme.

Martins (2017) meneliti novel karya Arundhati Roy berjudul *The Gods of Small Things* dan karya Kiran Desai berjudul *The Inheritance of Loss* dengan pendekatan poskolonialisme. Tujuan

penelitian tersebut memahami tentang kehidupan setelah pascakolonial yang terpengaruh oleh bangsa kolonial. Kedua novel tersebut mengungkap tentang sejarah, budaya, dan identitas bangsa yang tercermin dalam kedua novel karya Roy dan Desai. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh bangsa kolonial terhadap identitas, budaya, dan cita-cita masyarakat yang kemudian disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Anantama, dkk (2021) mengkaji tentang bentuk hibriditas dan mimikri yang tercermin dalam novel berjudul *Pangeran dari Timur* karya Iksaka Banu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk hibriditas tergambar melalui beberapa aspek seperti pendidikan, gaya busana, dan arti transportasi. Sementara itu, bentuk mimikri meliputi aspek gaya hidup, cara berpakaian, dan juga alat transportasi.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk hibriditas, mimikri, dan ambivalensi yang dipresentasikan dalam kumpulan cerpen berjudul *Berburu Buaya di Hindia Timur* (selanjutnya disingkat BBHT) karya Risda Nur Widia (selanjutnya disingkat RNW). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan bentuk-bentuk hibriditas, mimikri, dan ambivalensi yang dipresentasikan dalam kumpulan cerpen berjudul *BBHT* karya RNW. Pengkajian karya sastra tentang isu-isu yang berkaitan dengan pengaruh kolonialisme tersebut penting digali sebagai upaya untuk memberikan kesadaran cinta tanah air.

2. Metode

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah poskolonialisme sastra. Pendekatan poskolonialisme adalah bidang kajian sastra yang berkaitan dengan praktik kolonial bangsa penjajah baik pada masa itu maupun masa setelahnya. Sumber data dalam penelitian ini adalah buku kumpulan cerpen *BBHT* karya RNW. Kemudian, data penelitian berupa bentuk-bentuk hibriditas, mimikri, dan ambivalensi dalam buku kumpulan cerpen *BBHT* karya RNW. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis isi kualitatif terhadap dokumen karya sastra. Proses analisis data dilakukan secara interaktif menurut pada konsep (Milles, dkk, 2014: 31-33) yang meliputi proses reduksi data yang dilakukan dengan menggolongkan data sesuai dengan permasalahan. Selanjutnya penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan secara naratif hasil dari reduksi data. Kemudian penarikan simpulan bertujuan untuk memahami makna dari data yang telah diperoleh.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tujuh bentuk hibriditas yang meliputi: (1) bahasa, (2) pendidikan, (3) pola pikir, (4) kepercayaan, (5) sistem pengadilan, (6) gaya hidup, dan (7) peralatan hidup. Lebih lanjut, ditemukan juga lima bentuk mimikri yang meliputi: (1) alat

pembayaran, (2) sistem pajak, (3) senjata, (4) penamaan tempat, dan (5) bumbu dapur. Sementara itu, terdapat dua bentuk ambivalensi yaitu: (1) pergundikan dan (2) penghinaan.

3.1. Hibriditas

Pengalaman kolonialisme yang dialami oleh suatu wilayah dapat melahirkan suatu bentuk hibriditas. Hibriditas merupakan pencangkakan identitas kultural dalam rangka memantapkan status kekuasaan kolonial melalui kelompok perantara. Adapaun kelompok perantara yang dimaksud adalah pribumi yang mendapatkan pendidikan etis dari bangsa kolonial, sehingga kelompok perantara tersebut akan mengidentifikasi dirinya sebagai wakil budaya barat dihadapan pribumi lainnya. Berikut bentuk hibriditas yang terdapat dalam kumpulan cerpen *BBHT* karya RNW.

3.1.1 Bahasa

Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama manusia. Penggunaan bahasa pada setiap bangsa atau negara menjadi identitas, serta kebanggaan tersendiri atas keeksistensinya. Lebih dari itu, banyak negara merasa semakin bangga jika bahasa yang dimilikinya dapat dikenal, diakui, dan dipergunakan oleh banyak orang di luar negaranya. Sebab, hal ini dianggap mampu memposisikan bahasa tersebut dalam kedudukan yang lebih tinggi. Misalnya pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, pemerintah Belanda mewajibkan seluruh kegiatan politiknya dilakukan dengan menggunakan bahasa Belanda. Dengan demikian, secara tidak langsung pemerintah Belanda tengah berupaya untuk menaikkan kedudukan bahasa Belanda di atas bahasa rakyat Indonesia.

Pengaruh penggunaan bahasa Belanda pada masa kolonialisme terpresentasi dalam kumpulan cerpen *BBHT* karya RNW. Berikut ini bukti kutipan cerpen berjudul *1913* yang menggambarkan pribumi terutama kaum elite mempelajari bahasa Belanda dengan tujuan mendapatkan pengetahuan dan kesetaraan dengan bangsa Belanda.

“Suwardi menulis artikel terbuka yang ditujukan kepada pemimpin Belanda berjudul: Als ik Eens Nederlander Was yang kemudian oleh De Express diterbitkan. Pada artikel itu, Suwardi menuangkan seluruh asa dan harapan kaum pribumi kepada Pemerintah Putih sebagai lambang kerendahan hati merayakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda di negerinya” (1913: 108).

Bentuk hibriditas penggunaan bahasa yang terpresentasi dalam kutipan cerpen berjudul *1913* di atas, yakni adanya penggunaan bahasa Belanda oleh kaum pribumi. Penggunaan bahasa Belanda tersebut dimaksudkan untuk sarana komunikasi dan informasi baik itu dengan Pemerintah Belanda maupun dengan pribumi. Lebih dari itu, bahasa Belanda juga digunakan

oleh kaum elit pribumi untuk melawan pemerintahan Belanda.

Adanya penjajahan di suatu wilayah menyebabkan terjadinya percampuran bahasa yang digunakan oleh bangsa kolonial dengan bahasa orang-orang pribumi. Groeneboer (1999) berpendapat bahwa pada masa kolonialisme, bahasa Belanda disebut sebagai “bahasa sumber”, artinya bahasa Belanda merupakan jalan menuju perkembangan dan peradaban. Hal ini sesuai dengan kutipan berikut.

“Tjipto Mangoekoesoemo mengirim artikel yang bernada sama: menuntut perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda. Artikel Tjipto terbit pada 26 Juli 1913 dengan judul Karcht of Vress” (1913: 109).

Dalam kutipan cerpen berjudul *1913* tersebut di atas, bahasa Belanda juga digunakan sebagai alat untuk mengkritik penjajah yang tidak memiliki hati nurani. Bahasa Belanda digunakan sebagai alat menyampaikan kritik karena pada saat itu penggunaan bahasa Belanda dijadikan sebagai bahasa resmi sehingga kaum terpelajar menggunakan bahasa Belanda untuk dapat menyuarakan aspirasinya.

3.1.2 Pendidikan

Pendidikan dianggap sebagai sarana yang mampu memberikan tuntunan dan pencerahan terhadap umat manusia untuk menjadi pribadi dengan sikap yang berkeadaban. Pendidikan formal baru masuk ke Indonesia dimulai dari kedatangan bangsa Belanda. Afandi, Swastika, & Evendi (2020: 22) menyatakan bahwa pendidikan yang diberikan bangsa kolonial bersifat diskriminatif dan menguntungkan bangsa kolonial. Adanya bentuk kolonialisme di Indonesia tidak hanya memberikan pengalaman pahit akan penjajahan, namun juga memberikan pengaruh terhadap masyarakat pribumi untuk hidup lebih baik dengan mengenyam pendidikan di sekolah Belanda. Berikut ini bentuk hibriditas pendidikan dalam cerpen berjudul *1913* karya RNW.

“Suwardi mengabdikan dirinya pada pengetahuan sebagai cara untuk keluar dari kekalahan demi kekalahan yang terus datang mengoyak jiwa- jiwa tersiksa selama puluhan tahun itu. suwardi percaya bahwa pengetahuan akan mengangkat martabat negerinya yang telah dijatuhkan dan diinjak-injak oleh Pemerintah Putih sebagai budak di tanah kelahirannya sendiri” (1913: 103).

Zaman kolonialisme menyadarkan Suwardi bahwa bangsa kolonial telah membodohi dan memperbudak rakyat Indonesia. Melalui bangsa kolonial yang memiliki pengetahuan dan pendidikan tersebut, Suwardi menyadari bahwa hanya dengan pendidikan bangsanya dapat terlepas dari penjajahan di negaranya sendiri. Imsawati, dkk (2017) berpendapat bahwa

perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan tidak hanya dilawan dengan fisik melainkan juga kemampuan intelektual melalui pendidikan.

Penyelenggaraan pendidikan di tanah air pada masa penjajahan Belanda telah menyadarkan rakyat pribumi bahwa intelektualitas sangatlah penting. Adanya pendidikan memudahkan seseorang dalam memecahkan persoalan seperti pada bidang kesehatan maupun bidang-bidang lainnya seperti dalam kutipan cerpen berjudul *1913* berikut.

“Sementara bagi Tjipto Mangoenkoesoemo, keringanan hukuman diturunkan juga sebagai tahanan rumah dikarenakan Tuan Tjipto telah berjasa dalam dunia kesehatan dan Pemerintah Putih pernah memberikan bintang penghargaan Rider in de Ode van der Oranje Nassu (penghargaan atas jasa memberantas penyakit pes). Atas jasa ini, Pemerintah Putih memilih menjadikan Tuan Tjipto tahanan rumah sampai jangka waktu yang belum diketahui.” (1913: 131).

Dengan pendidikan yang dimilikinya Tjipto Mangoenkoesoemo mampu memberantas penyakit pes di Hindia Belanda yang mengakibatkan pandemi di abad 20 yang menewaskan ribuan penduduk pribumi. Pengetahuan yang didapat melalui pendidikan modern di sekolah Belanda menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat pribumi, karena dengan pendidikanlah masyarakat dapat memecahkan segala persoalan dalam kehidupan juga siasat melawan penjajahan.

3.1.3 Pola Pikir

Masa penjajahan Belanda dapat dianggap menjadi pemicu atas pergeseran pola pikir masyarakat pribumi. Hal ini karena bentuk penjajahan yang sangat lama di Indonesia menyebabkan adanya interaksi kedua budaya baik itu Belanda dan Indonesia sehingga melahirkan cara pandang baru di kehidupan masyarakat pribumi. Cara pandang tersebut menunjukkan bentuk kemajuan pada masyarakat pribumi. Bentuk hibriditas cara pandang tergambar dalam kutipan cerpen berjudul *Para Bandit dan Hantu Ophaalbrug* (selanjutnya disingkat PBHO) sebagai berikut.

“Sementara, wanita lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk merawat anak dan menyiapkan makan bagi suami. Walau ada beberapa wanita yang ikut bekerja layaknya laki-laki, mengabdikan tenaganya sebagai buruh pengolah garam”. (PBHO: 4).

Kutipan cerpen *PBHO* tersebut menunjukkan adanya kebaruan cara pandang masyarakat pribumi bahwa perempuan tidak hanya berdiam diri di rumah, melainkan perempuan memiliki hak dan kesempatan untuk bekerja mendapatkan penghasilan. Adanya bentuk hibriditas ini ditandai dengan kemajuan cara berpikir perempuan pribumi yang juga ditandai dengan adanya

emansipasi wanita di Indonesia oleh RA. Kartini. Mustikawati (2015) mengatakan bahwa makna konsepsi emansipasi wanita dalam pemikiran R. A. Kartini adalah menginginkan kebebasan dan mandiri. Bebas dan mandiri dalam bidang pendidikan dan kehidupan berumah tangga. Selanjutnya, bentuk hibriditas pola pikir juga terjadi dalam kutipan cerpen berjudul *Nasib Seorang Pelaut* (selanjutnya disingkat NSP) berikut ini.

“Ia curiga penyakit misterius itu bukan berasal dari serangan makhluk halus, melainkan gaya hidup masyarakat yang sangat buruk. Kecurigaan ini semakin mengerucut ketika mengingat bagaimana penduduk acap memakan daging mentah dengan tangan-tangan kotor mereka. Laval pun membagikan kecurigaan ini kepada Raja Male melalui penerjemah desa. Raja Male tak begitu bisa menerima kecurigaan Laval. Raja Male lantas memanggil seorang dukun.”
(NSP: 67).

Bertolak pada kutipan cerpen tersebut, maka dapat dilihat adanya bentuk hibriditas pola pikir. Hal itu dapat diketahui dari pemikiran Laval sebagai seorang warga negara Prancis mencurigai tentang penyakit misterius yang menimpa penduduk Furudu itu bukan disebabkan oleh serangan makhluk halus melainkan karena gaya hidup Raja Male dan penduduk Furudu yang tidak steril.

Orang-orang negara maju telah mempunyai pola pikir yang lebih baik dan ilmiah bahwa penyakit yang menyerang tubuh manusia itu disebabkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Mereka telah mengenal adanya dokter sementara orang-orang pribumi semasa penjajahan masih banyak yang mengandalkan para dukun. Kehadiran orang-orang dari negara maju dalam wilayah pribumi itu memberikan suatu pola pikir baru dalam dunia medis.

3.1.4 Kepercayaan

Pada masa penjajahan Belanda, banyak rakyat Indonesia yang belum mengenyam pendidikan formal seperti halnya orang-orang dari bangsa penjajah yang terlebih dahulu merasakan efek dari sebuah pendidikan yakni adanya pemikiran yang logis berdasarkan pada teori-teori ilmiah atau ilmu pengetahuan yang kuat. Sementara itu, rakyat Indonesia masih mempercayai adanya hal-hal mistis, dan selalu mengaitkan suatu fenomena dengan kemistikan. Robbi & Rachaju (2018) berpendapat bahwa beberapa hal mistik yang mengarah kepada kepercayaan takhayul dan sangat bertentangan dengan agama perlu diberantas supaya tidak membodohkan pikiran masyarakat. Berikut ini kutipan cerpen berjudul PBHO yang menunjukkan adanya gejala hibriditas kepercayaan yang dapat dirasakan oleh bangsa Indonesia sampai saat ini.

“Kapten Zware Laarzen tertawa saat membicarakan para hantu itu, tampangnya tampak

seperti juru tipu yang mahir. Kapten Roff bukan pria cengeng yang begitu saja takut pada takhayul. Ia pria Hindia-Belanda yang terhormat dan mendapatkan pendidikan formal secara layak. Ia tidak pernah koyak mentalnya ketika menerima cerita-cerita mistis.” (PBHO: 3).

Hibriditas kepercayaan yang digambarkan dalam kutipan cerpen PBHO tersebut menunjukkan bahwa Kapten Roff tidak mempercayai adanya hal mistis karena dirinya merasa telah mempunyai pemikiran yang logis akibat dari pendidikan formal yang telah ditempuhnya. Hal tersebut menandakan bahwa kepercayaan setiap manusia itu sangat dipengaruhi oleh pengetahuan yang didapatkan melalui pendidikan. Tanpa adanya pendidikan maka akan sulit untuk membentuk kepercayaan yang benar (tidak menyimpang).

Bentuk hibriditas kepercayaan tidak hanya hadir atas pengaruh dari penjajah Belanda, tetapi juga dipengaruhi oleh negara lain yang sempat singgah di wilayah Indonesia. Misalnya dalam hal yang berkaitan dengan kesehatan, pada zaman dahulu banyak orang pribumi, mengaggap bahwa suatu penyakit yang menimpa manusia seringkali dikaitkan dengan kekuatan magis (hal gaib). Sementara, orang-orang bernegara maju mempercayai bahwa suatu penyakit pasti dapat dibuktikan kebenaran ilmiahnya, bukan disebabkan oleh hal-hal ghaib melainkan oleh gaya hidup manusia itu sendiri. Berikut ini adalah kutipan cerpen berjudul *Nasib Seorang Pelaut (NSP)* yang menunjukkan adanya hibriditas kepercayaan.

“Hanya saja, ketika menyadari kasus itu tidak hanya terjadi sekali atau tiga kali saja, Ia curiga penyakit misterius itu bukan berasal dari serangan makhluk halus, melainkan gaya hidup masyarakat yang sangat buruk. Kecurigaan ini semakin mengerucut ketika mengingat bagaimana penduduk acap memakan daging mentah dengan tangan-tangan kotor mereka. Laval pun membagikan kecurigaan ini kepada Raja Male melalui penerjemah desa. Raja Male tak begitu bisa menerima kecurigaan Laval. Raja Male lantas memanggil seorang dukun” (NSP: 67).

Fenomena yang tercermin dalam kutipan cerpen NSP tersebut dikatakan sebagai bentuk hibriditas kepercayaan karena mengandung unsur-unsur kemistikan dalam mendiagnosis sebuah penyakit. Ilyas (2018: 326) berpendapat bahwa pandangan masyarakat terhadap dukun mengacu pada hal yang lebih tinggi (Tuhan) yang dianggap mampu menjadi tempat bercurah dalam setiap sendi kehidupan manusia, dukun tampil sebagai sosok penolong dan pembantu yang hadir ditengah-tengah masyarakat, serta terkonstruksi menjadi sebuah penyelesaian masalah yang dijadikan sebuah kemanjuran ketika sudah melewati batasnya.

3.1.5 Sistem Peradilan

Ada dua sistem peradilan yang diberlakukan oleh pemerintahan Belanda pada masa penjajahan di Indonesia. Pertama, sistem peradilan yang diperuntukan bagi masyarakat pribumi dan dilakukan secara terbuka. Kedua, sistem pengadilan bagi orang-orang Eropa yang dilakukan dengan cara sidang tertutup. Kedua sistem peradilan tersebut hendaknya berjalan semestinya atau sesuai peruntukannya. Tetapi, karena pada masa penjajahan Belanda itu terdapat dua orang pribumi yang berpengetahuan mumpuni (pandai). Kepandaian mereka dianggap sebagai ancaman terhadap kedudukan Belanda di Indonesia. Oleh karena itu, kedua orang pribumi tersebut akhirnya ditetapkan untuk melaksanakan sidang tertutup. Pelaksanaan sidang tertutup bagi dua orang asli pribumi tersebut adalah sebuah hal yang baru (hibriditas) bagi penduduk pribumi. Berikut ini adalah data kutipan cerpen berjudul *1913* yang mengandung unsur hibriditas berupa sistem peradilan.

“Kami memang sengaja membuat pengadilan tertutup seperti ini. Pengadilan ini juga khusus diadakan dengan sistem keputusan Pemerintah Putih walaupun dua di antara kalian adalah kaum pribumi,” ucap Dedrick Gotthard dengan gaya khasnya memainkan kumis, “ini mungkin persidangan pertama yang diadakan dengan cara seperti ini. Karena, kalian tahu bukan, di negeri ini ada dua macam sidang, yaitu sidang untuk kaum pribumi dan masyarakat Eropa. Kecakapan pengetahuan kalian membuat kami mengambil keputusan untuk melakukan persidangan secara tertutup dengan tata cara Eropa ini.” (1913:127).

Masa kolonial Belanda yang sangat lama, rupanya juga telah memperkenalkan rakyat Indonesia terhadap pemberlakuan sistem peradilan. Misalnya dalam kutipan cerpen berjudul *1913* tersebut bahwa sistem peradilan terjadi ketika Suwardi dan Tjipto Mangoenkoesoemo hendak diadili oleh Pemerintah Putih dengan sistem peradilan tertutup. Padahal, Suwardi dan Tjipto adalah seorang pribumi asli dan peradilan tertutup biasanya hanya diperuntukan bagi masyarakat Eropa. Selanjutnya, sistem peradilan akibat adanya penjajahan Belanda juga tercermin dalam kutipan cerpen berjudul *Thomas Matulesy dalam Kenangan Benteng Victoria* (selanjutnya disingkat TMDKBV) berikut ini.

“Mereka sama sekali tidak menampakkan raut sedih dan kalah ketika dieksekusi. Aku sendiri melihat bagaimana Thomas Matulesy digantung” (TMDKBV: 149).

Kutipan cerpen TMDKBV di atas menunjukkan bahwa proses hukuman dari penjajah Belanda pada Thomas Matulesy dilakukan secara tertutup di Benteng Victoria. Adanya sistem peradilan tertutup dilakukan setelah kedatangan bangsa kolonial. Hukuman tersebut tidak disaksikan langsung oleh rakyat melainkan oleh para petinggi Belanda.

3.1.6 Gaya Hidup

Masing-masing bangsa atau negara mempunyai gaya hidup yang berbeda-beda. Misalnya saja gaya hidup ketika makan. Umumnya, masyarakat Indonesia mempunyai kebiasaan makan menggunakan tangan, terutama pada masa penjajahan. Sementara itu, kaum penjajah mempunyai kebiasaan makan dengan menggunakan sendok, garpu, dan alat-alat lainnya. Salah satu bentuk gaya hidup yang sampai saat ini melekat pada kehidupan masyarakat Indonesia adalah cara makan yang tidak hanya menggunakan tangan, tetapi juga terkadang dengan menggunakan alat-alat seperti sendok dan sejenisnya. Bentuk hibriditas gaya hidup dapat diketahui melalui data kutipan cerpen berjudul BBHT berikut ini.

“Charles Leseur tidak sampai hati memasukkan tangannya ke dalam mulut secara langsung seperti penduduk Babao. Akhirnya, Ia mengambil sebuah sendok-sebenarnya tidak begitu mirip sendok-yang terbuat dari bambu. Dan dengan menyebut nama Kristus beberapa kali, Charles Leseur menyantap makanan” (BBHT: 19).

Gejala hibriditas gaya hidup yang dilukiskan dalam kutipan cerpen berjudul BBHT tersebut menunjukkan bahwa gaya hidup yang dibawa Charles Lesueur tersebut tentu menjadi sebuah hal baru bagi penduduk Babao sekaligus penduduk Indonesia di masa lalu. Tetapi, seiring dengan adanya pengaruh dari bangsa Eropa yang selama ini menjajah atau berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia maka gaya hidup penduduk Indonesia pun kian mengalami perubahan. Hal tersebut dapat dilihat ketika acara-acara formal maupun semi formal seperti acara hajatan atau pesta, masyarakat Indonesia telah terbiasa makan dengan menggunakan alat bantu seperti halnya sendok dan sejenisnya. Sementara itu, gaya hidup yang terpengaruh oleh budaya kolonial juga terdapat dalam kutipan cerpen berjudul *1913* berikut ini.

“Hari itu Pemerintah Putih mengumumkan bahwa masyarakat Hindia Belanda akan mengadakan pesta akbar 100 tahun kemerdekaan Belanda atas negeri yang pernah menjajahnya: Perancis” (1913:104).

Bentuk hibriditas akibat adanya pengaruh dari bangsa kolonial hingga kini masih melekat. Buktinya, hingga detik ini masyarakat Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan setelah lepas dari penjajahan Belanda. Kutipan tersebut mendakan bahwa adanya hibriditas berupa gaya hidup yang memengaruhi masyarakat Indonesia hingga saat ini.

3.1.7 Peralatan Hidup

Kedatangan bangsa lain ke negara Indonesia mampu memberikan dampak yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung, dan disadari atau tanpa disadari. Dalam hal

peralatan hidup misalnya, sebagai negara terjajah dan negara berkembang Indonesia mendapatkan beragam pengaruh dari negara-negara yang dianggap lebih maju. Pengaruh tersebut menimbulkan adanya persilangan yang merujuk pada lahirnya hal-hal baru.

Dalam budaya masyarakat Indonesia dapat diketahui banyak menggunakan peralatan hidup yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Sementara negara-negara maju mempunyai peralatan hidup yang dinilai lebih maju. Beragam peralatan hidup yang diperkenalkan oleh bangsa lain menjadikan sesuatu hal yang baru dikenal oleh bangsa Indonesia. Pengenalan terhadap jenis-jenis peralatan baru itu menyebabkan adanya peniruan dan juga percampuran menjadi bentuk peralatan-peralatan yang baru. Bentuk hibriditas peralatan hidup dapat diketahui melalui data kutipan cerpen berjudul BBHT di bawah ini:

“Saat kembali ke desa, Peron meminta warga Babao membantunya. Akan tetapi, mereka enggan menuruti permintaan Peron. Mereka lebih memilih membuat coussambi atau benda-benda aneh lain yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Peron tidak menyerah. Sekali lagi, Peron meminta bantuan kepada Kain Naba Leiba. Karena desakan Peron, serta iming-iming barter barang yang belum pernah dimiliki Kain Naba Leiba, akhirnya pemimpin desa itu menyetujui” (BBHT: 29).

Kutipan cerpen BBHT tersebut menyiratkan bahwa penduduk desa Babao memiliki sejumlah peralatan hidup bernama *coussambi* dan benda-benda lainnya yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Peralatan hidup yang dimiliki penduduk Babao dinilai aneh oleh beberapa orang Prancis yang tengah berkunjung ke desa Babao tersebut. Orang-orang Prancis itu adalah kawan Charles Lesueur yang sedang berburu buaya di sungai Babao. Mereka hendak meminta bantuan kepada penduduk Babao untuk membawa buaya raksasa hasil perburuannya. Oleh karena itu, orang-orang Prancis tersebut meminta penduduk Babao khususnya kepala desa Babao dengan menukar sejumlah benda yang dimiliki orang Prancis.

Selain itu, adanya bangsa kolonial di wilayah koloni mengakibatkan adanya pengaruh dalam hal infrastruktur. Bangsa kolonial membangun infrastruktur di wilayah jajahan untuk memudahkan urusannya. Hal ini terdapat dalam kutipan cerpen berjudul PBHO berikut.

“Awak kapal itu berlalu. Kapten Roff menarik nafas. Ketakutan sudah menemaninya seperempat jalan ketika kapal mulai melewati jembatan gantung Ophaalbrug”. (PBHO: 7).

Kutipan tersebut menandakan adanya gejala hibriditas berupa peralatan hidup. Jembatan pada masa penjajahan Belanda digunakan sebagai alat untuk memudahkan dalam distribusi barang hasil jajahan. Akan tetapi, hingga saat ini fungsi jembatan tetaplah sama sebagai sarana yang digunakan untuk mempermudah distribusi barang.

3.2. Mimikri

Mimikri adalah suatu bentuk peniruan yang dilakukan oleh masyarakat pribumi terhadap bangsa kolonial. Adanya kolonialisme di Indonesia menyebabkan masyarakat pribumi meniru budaya ataupun hal lainnya dari bangsa kolonial, bahkan kegiatan meniru tersebut tetap melekat hingga masa kini. Berikut mimikri dalam Kumpulan Cerpen BBHT Karya RNW.

3.2.1 Alat Pembayaran

Salah satu bentuk peniruan yang hingga kini masih bertahan adalah alat pembayaran berupa uang. Adanya sistem mata uang di Indonesia merupakan hasil dari proses mimikri yang dilakukan masyarakat pribumi terhadap penjajahan Belanda. Sebelum kedatangan bangsa kolonial, dalam kegiatan transaksi masyarakat menggunakan sistem barter atau menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Pendapat ini diperkuat oleh Restiyadi & Nasoichah (2017: 2) yang menyatakan bahwa alat pembayaran sebelum adanya kolonialisme menggunakan sistem barter dan logam. Akan tetapi, setelah kedatangan bangsa Belanda masyarakat pribumi menggunakan mata uang Belanda. Berikut mimikri dalam hal penggunaan mata uang kertas dalam cerpen berjudul TMDKBV.

“Beberapa minggu kemudian, ia menemukan dua namanya yang nantinya bakal menjadi kunci kekalahan Thomas Matulesy, yaitu Pati Akoon dan Dominggus Thomas Tuwanakotta. Dua orang ini kemudian diundang datang ke tubuhku. Mereka pada awalnya menolak membocorkan rahasia pasukan Thomas Matulesy. Tetapi berkat uang 1000 gulden, mereka buka mulut juga.”(TMDKBV: 148).

Mata uang *gulden* pada zaman penjajahan Belanda sangatlah penting. Uang tersebut dinilai lebih besar dari alat pembayaran lainnya. Oleh sebab itu, mata uang Belanda (*gulden*) ini hingga awal kemerdekaan masih digunakan, bahkan pada saat Jepang melakukan penjajahan di Indonesia. Akan tetapi, setelah kemerdekaan Pemerintah Indonesia baru mengesahkan mata uang Republik Indonesia (ORI) pada tahun 1946 (Lasmiyati, 2012: 476). Adanya pengesahan tersebut menandakan bahwa sistem pembayaran yang sah yaitu menggunakan uang rupiah, sedangkan mata uang *gulden* dan mata uang *yen* dianggap tidak berlaku. Hal inilah yang menunjukkan adanya bentuk mimikri masyarakat pribumi khususnya dalam penggunaan mata uang kertas. Berikut ini bukti kutipan cerpen berjudul *Babad Goa Jlamprong* (selanjutnya disingkat BGJ) yang menggambarkan tentang bentuk mimikri terhadap alat pembayaran.

“Hanya saja, kami mengerti kalau pangeran bernama Diponegoro itu adalah orang penting dikalangan keraton. Buktinya ia dicari-cari. Selain itu, aku juga mendengar Diponegoro diperebutkan sebagai sayembara. Konon, ia dihargai 50.000 gulden untuk siapa saja yang

bisa menangkapnya.”(BGJ: 87).

Kutipan cerpen BGJ di atas menunjukkan adanya gejala mimikri terhadap mata uang *gulden* (mata uang Belanda) dalam kegiatan transaksi yang dilakukan masyarakat pribumi. Hal ini disebabkan karena pada zaman penjajahan Belanda uang yang digunakan oleh pribumi adalah *gulden* sehingga dalam segala transaksi apapun itu masyarakat pribumi menggunakan mata uang Belanda.

3.2.2 Sistem Pajak

Rizki A (2018: 83) mengemukakan bahwa pada awal kemerdekaan, Indonesia pernah mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan (PPn) 1951. Pengenaan pajak secara sistematis dan permanen, dimulai dengan pengenaan pajak terhadap tanah, hal ini telah ada pada zaman kolonial. Pajak ini disebut “*Landrent*” (sewa tanah) oleh Gubernur Jenderal Raffles dari Inggris. Pada masa penjajahan Belanda disebut “*Landrente*”.

Sistem pajak di Indonesia merupakan hasil mimikri dari sistem pajak pada zaman penjajahan. Raffles dan Van den Bosch telah mengenalkan sistem pajak pada masyarakat pribumi. Pemungutan pajak tersebut berupa pajak usaha, pajak rumah, dan pajak penghasilan (Zed, 2017: 93). Kemudian, sistem pajak tersebut ditiru oleh masyarakat Indonesia hingga masa kini. Bukukumpulan cerpen BBHT karya RNW juga menggambarkan tentang sudah adanya sistem pajak ketika masa kolonial. Berikut terdapat kutipan cerpen berjudul *1913* yang menggambarkan tentang sistem pajak di masa penjajahan Belanda.

“Selain menggunakan kekerasan, petugas pemungut pajak Pemerintah Putih pun acap mengumpatkan kata “anjing” dengan keras kepada keluarga yang tak dapat membayar pajak. Mereka seolah sengaja memperlihatkan kegaduhan pada masyarakat sebagai peringatan agar patuh membayar pajak.” (1913: 102)

Sistem perpajakan telah diterapkan sejak zaman penjajahan Belanda. Akan tetapi, pada masa penjajahan sistem perpajakan bersifat memaksa dan tidak berlandaskan pada keadilan. Hal ini selaras dengan pernyataan Furnival dan Day dalam (Wahid, 2017: 32) yang menjabarkan bahwa sistem pajak yang diterapkan oleh bangsa kolonial merupakan sistem yang membebani masyarakat dan bersifat eksploitatif. Masyarakat dituntut membayar pajak terhadap bangsa kolonial, namun masyarakat tidak diberi hak-hak atas pajak yang telah diberikan. Usaha peniruan terhadap sistem perpajakan dapat dirasakan hingga saat ini. Bedanya, sistem pajak yang saat ini berkembang lebih bersifat adil. Kewajiban yang telah dibayarkan oleh masyarakat akan dikembalikan kepada masyarakat melalui fasilitas, sarana prasarana, melindungi produksi

dalam negeri, dan membangun kesejahteraan rakyat demi terselenggaranya pembangunan nasional.

3.2.3 Senjata

Senjata merupakan alat yang digunakan untuk mempertahankan diri. Senjata-senjata yang digunakan oleh bangsa kolonial memberikan pengaruh terhadap berkembangnya senjata-senjata modern di Indonesia. Sebelum kedatangan penjajah, masyarakat pribumi menggunakan senjata tradisional yang digunakan untuk melindungi diri. Akan tetapi, setelah kedatangan penjajah, terjadi adanya proses mimikri yang dilakukan oleh masyarakat melalui senjata tersebut. Buku kumpulan cerpen BBHT karya RNW juga merepresentasikan tentang penggunaan senjata sebagai upaya untuk mempertahankan diri dari serangan lawan. Salah satunya tercermin dalam kutipan cerpen berjudul PBDHO, yakni menjelaskan adanya mimikri dibidang persenjataan.

“Pria parah baya keturunan Belanda- Prancis ini bisa membayangkan bagaimana kapal itu disergap dalam kegelapan. Lalu, baku tembak terjadi di tengah kebutaan awak kapal. Pedang- pedang menyambar masing- masing tubuh dengan cara brutal.” (PBDHO: 7).

Proses peniruan masyarakat pribumi terhadap bangsa penjajah dalam kutipan tersebut ditandai dengan penggunaan senjata oleh para bandit untuk menyerang kapal yang menampung garam. Senjata tersebut berupa senapan yang sebelumnya masuk ke Indonesia setelah dibawa oleh bangsa kolonial. Sebelum mengenal senjata laras panjang, masyarakat Indonesia memiliki senjata tradisional seperti bambu runcing, keris, golok, celurit, dan sebagainya yang digunakan untuk bertahan hidup. Adanya senjata-senjata modern yang dibawa oleh bangsa kolonial akhirnya ditiru oleh masyarakat pribumi sebagai senjata yang digunakan untuk bertahan hidup atau membela diri. Lebih lanjut, alat-alat persenjataan yang digunakan oleh bangsa penjajah saat melakukan pertahanan dan penyerangan terhadap pribumi itu meninggalkan jejak yang cukup berarti. Contohnya, meriam dan bedil banyak digunakan pada pemerintah Indonesia saat ini. Penggunaan senjata peninggalan Belanda tersebut termasuk bentuk mimikri dalam hal persenjataan seperti yang terkandung dalam kutipan cerpen berjudul TMKBV berikut ini:

“Namun ketika sampai, pada 20 Mei 1817, kapal yang digunakan Mayor Beetjes diserang dengan tembakan-tembakan hasil rampasan sebelumnya. Beberapa kapal bahkan karam terkena tembakan yang dilontarkan pasukan Thomas Matulesy dari darat dan air. Mayor Beetjes menarik mundur pasukannya dan memutar haluan kapalnya ke arah teluk yang terletak di sebelah kiri Benteng Duurstede. Di tempat itu, lagi-lagi, pasukan Mayor Beetjes

disambut tembakan meriam, bedil, panah, dan tombak...” (TMKBV, 145).

Matulesy berhasil merampas senjata-senjata milik kolonial. Senjata tersebut berupa meriam dan bedil. Meriam dan bedil itu biasa digunakan para penjajah untuk menggempur penduduk pribumi yang berani memberontak terhadap kekuasaannya. Bentuk mimikri senjata itu terlihat ketika Matulesy juga berhasil meniru dalam menggunakan senjata itu saat menyerang pasukan Mayor Beetjes.

3.2.4 Penamaan Tempat

Bentuk mimikri berikutnya yaitu adanya penggunaan istilah asing dalam penamaan tempat di Indonesia. Adanya penamaan tersebut tentu mendapat pengaruh dari bangsa kolonial yang pada akhirnya ditiru oleh masyarakat pribumi. Hal itu dapat diketahui dari kutipan cerpen berjudul PBHO berikut.

“Awak kapal itu berlalu. Kapten Roff menarik napas. Ketakutan sudah menemaninya seperempat jalan ketika kapal mulai melewati jembatan gantung *Oghaalbrug*.” (PBHO: 7).

Istilah *Ophaalbrug* digunakan untuk menamai sebuah jembatan gantung yang terbentang di atas sungai Marengan Sumenep Jawa Timur. Keberadaan jembatan tersebut sebagai simbol bahwa Indonesia (Sumenep) pernah menjadi objek jajahan bangsa kolonial yang memberikan sebuah peninggalan berupa jembatan gantung *Ophaalbrug*. Gejala mimikri terjadi ketika penyebutan jembatan tersebut hingga kini masih sering disebut sebagai jembatan gantung *Ophaalbrug*. Bentuk mimikri lain terhadap nama tempat juga terdapat dalam kutipan cerpen berjudul TMDKBV berikut.

“...Nama itu pernah akan diubah menjadi Tembok Laut ketika Raffles mendudukiku sebagai benteng pertahanan sementara. Tetapi nama Tembok Laut tidak benar-benar aku sandang karena peralihan kekuasaan kembali dari Inggris ke Belanda pada 1814, lebih tepatnya setelah terjadi Traktat London.” Sejak itu, namaku lebih sering disebut sebagai Victoria....(TMDKBV: 136).

Kata Victoria berasal dari bahasa Romawi berarti ‘kemenangan’. Meskipun bangsa kolonial telah pergi dari Indonesia, masyarakat tidak mengubah nama benteng tersebut melainkan tetap mempertahankannya bahkan mengenalkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa benteng tersebut bernama Benteng Victoria sebagai peninggalan bangsa kolonial. Hal ini berarti bahwa masyarakat pribumi telah melakukan peniruan dalam penyebutan nama tempat seperti yang dilakukan oleh bangsa kolonial saat masa penjajahan.

3.2.5 Bumbu Dapur

Masa penjajahan Belanda meninggalkan beragam jenis makanan yang kemudian banyak ditiru oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini. Misalnya, ketika masa penjajahan Belanda banyak berdiri pabrik-pabrik garam yang dikuasai oleh saudagar-saudagar Belanda. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, kemudian masyarakat pribumi melanjutkan pembuatan garam tersebut yang hingga saat ini garam sangat memberikan manfaat bagi kehidupan pribumi khususnya untuk mendukung kegiatan memasak. Produksi dan penggunaan garam yang masih berlanjut sampai sekarang adalah sebuah mimikri/peniruan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa kolonial. Yulinda, dkk (2014: 70) mengungkapkan bahwa setelah negara Indonesia merdeka semua ladang-ladang garam di Indonesia yang dikuasai pemerintah kolonial diambil-alih oleh pemerintah RI termasuk perusahaan garam di Sumenep. Berikut ini adalah bukti kutipan cerpen berjudul PBHO yang menunjukkan adanya mimikri dalam hal makanan.

“Penduduk Sumenep lebih banyak menjadi budak dan kacung. Para pria banyak bekerja dengan mengandalkan ototnya, banting tulang mengangkuti atau mengolah garam untuk disetorkan ke pabrik...”(PBHO:3).

Kutipan cerpen tersebut menggambarkan bahwa pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Sumenep banyak dipekerjakan sebagai budak atau kacung oleh para penguasa (Belanda). Penduduk Sumenep bekerja sebagai pembuat garam di pabrik-pabrik milik para saudagar garam. Pekerjaan membuat garam yang dilakukan oleh masyarakat Sumenep pada saat itulah yang kemudian sampai saat ini bangsa Indonesia masih dapat mengenal dan mempergunakan garam dalam kehidupan sehari-hari. Berawal dari produksi garam semasa penjajahan, dan sampai saat ini masyarakat Indonesia mampu melakukan peniruan makanan (garam/bumbu dapur) tersebut.

3.3 Ambivalensi

Ambivalensi adalah suatu sikap yang berlawanan atau bentuk penolakan yang dilakukan oleh kelompok penjajah kepada kelompok terjajah, meskipun kelompok terjajah telah melakukan usaha peniruan agar dapat dianggap sederajat atau seimbang dengan bangsa kolonial. Dengan demikian, maka ambivalensi selalu berkaitan dengan peniruan atau mimikri yang dilakukan oleh kelompok terjajah terhadap kelompok penjajah. Berikut adalah bentuk ambivalensi yang terdapat dalam cerpen BBHT karya RNW.

3.3.1 Pergundikan

Penjajah yang datang ke Indonesia merasa tertarik dengan wanita-wanita pribumi yang

dianggapnya cantik. Tetapi, meskipun beberapa wanita Indonesia dianggapnya sebagai wanita yang tergolong cantik layaknya para wanita di negaranya, mereka tetap saja mengaggap rendah wanita Indonesia. Hal tersebut dapat diketahui dari adanya praktik pergundikan pada masa penjajahan. Wanita gundik adalah wanita yang dijadikan sebagai pelayan nafsu para lelaki Belanda, dan kedudukan para wanita itu tidak bisa menyaingi kedudukan wanita Belanda sebagai istri sah. Berikut kutipan yang mencerminkan adanya pergundikan dalam buku kumpulan cerpen BBHT karya RNW, yakni tergambar pada cerpen berjudul PBHO di bawah ini.

“Sore itu juga-walau dengan memaksa- Kapten Roff meniduri wanita bertubuh kecil dengan mata yang indah. Akan tetapi, belum sempat ia menidurinya lebih dari sekali, wanita itu sudah bunuh diri. Sial bagi Kapten Roff, ia sudah berencana membawa wanita itu ke Batavia dan menjadikannya seorang Nyai di rumahnya yang cukup besar.” (PBHO: 5).

Kutipan di atas mengisahkan bahwa perempuan pribumi seolah hanya alat pemuas nafsu para penjajah kolonial. Selain itu, perempuan pribumi juga kerap disiksa oleh bangsa kolonial karena menentang keinginan bangsa kolonial yang memaksa menjadikannya sebagai penuntas hajat hidupnya. Pemerintah kolonial menganggap perempuan pribumi patut untuk diperlakukan secara kejam. Meskipun perempuan pribumi telah berusaha melakukan mimikri supaya diperlakukan sama dengan wanita-wanita dari bangsa Kolonial, namun pada kenyataannya perlakuan bangsa kolonial tetaplah tidak berubah.

3.3.2 Penghinaan

Adanya proses mimikri yang dilakukan oleh masyarakat pribumi tidak serta merta menjadikan bangsa kolonial mengakui kesetaraan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat pribumi. Padahal, dengan datangnya bangsa kolonial cara pandang dan segala aktivitas bangsa kolonial memengaruhi perilaku masyarakat pribumi. Alhasil, banyak masyarakat pribumi yang mengikuti cara atau perilaku bangsa kolonial supaya mendapat pengakuan sebagai manusia yang beradab. Akan tetapi, meskipun masyarakat pribumi telah berusaha melakukan mimikri, tetap saja bangsa kolonial tidak mengakui bahkan tetap melakukan penghinaan terhadap masyarakat pribumi. Dalam kutipan cerpen berjudul *1913* juga mencerminkan adanya penghinaan bangsa kolonial terhadap masyarakat pribumi, sebagai berikut.

“Donkere lucht! Para monyet tak tahu aturan! Umpat Gubernur Jenderal Inderbrug yang merasa kehormatannya telah dijatuhkan di negeri jajahannya sendiri. Gubernur Jenderal Inderbrug merasa dihina oleh masyarakat pribumi yang kelasnya setara budak.” (1913: 110)

Penghinaan tergambar dalam kutipan cerpen tersebut berupa penggunaan kata-kata kasar dan kotor yang menyamakan masyarakat pribumi dengan hewan atau budak. Padahal, masyarakat pribumi tersebut (Suwardi dan Tjipto) merupakan pribumi yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang sama dengan bangsa kolonial.

“Vervloekt! Benar-benar monyet liar!” Gubernur Jenderal Inderbrug memukul mejanya dengan sangat keras. “Lekas tangkap dan seret mereka kepenjara. Di negeri ini tidak boleh ada begundal seperti Suwardi dan Tjipto.” (1913: 114).

Gubernur Jenderal Inderbrug mengatakan bahwa Suwardi dan Tjipto merupakan seorang begundal. Padahal, keduanya adalah tokoh berpengaruh di masa Hindia Belanda. Suwardi sebagai keturunan keraton, bersekolah di sekolah Belanda, serta menguasai bahasa Belanda, sedangkan Tjipto adalah seorang dokter yang menerima penghargaan sebagai tokoh yang mampu menanggulangi penyakit pes di Hindia Belanda yang juga fasih berbahasa Belanda. Akan tetapi, bangsa kolonial tetaplah memandang keduanya tidak setara, bukan kaumnya, dan kelasnya setara budak ataupun begundal. Lebih dari itu, bangsa penjajah bahkan sering menghina, menganggap rendah penduduk pribumi, dan memaksa pribumi untuk selalu tunduk kepadanya.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Kumpulan cerpen BBHT terdapat unsur hibriditas yang terdiri dari bahasa, pendidikan, pola pikir, kepercayaan, sistem peradilan, gaya hidup, dan peralatan hidup. Unsur mimikri didapatkan berupa alat pembayaran, sistem pajak, senjata, nama tempat, dan bumbu dapur. Adapun ambivalensi yang terdapat dalam kumpulan cerpen *BBHT* terdiri dari pergundikan dan penghinaan. Unsur- unsur kolonialisme tersebut terwujud dalam berbagai hal dalam kehidupan. Selain itu, bentuk kolonialisme menyebabkan adanya nilai-nilai baru yang tertanam dalam bangsa jajahan hingga sekarang dan melekat pada masyarakat terjajah akibat adanya proses persilangan, peniruan, ataupun penolakan dari masyarakat penjajah.

5. Daftar Pustaka

- Afandi, A. N., Swastika, A. I., & Evendi, E. Y. (2020). Pendidikan pada Masa Pemerintah Kolonial di Hindia Belanda Tahun 1900-1930. *Jurnal Artefak* 7(1), 21-30.
- Al Kautsar, S. A. (2020). Jejak Kolonial dalam Kumpulan Cerpen Teh dan Pengkhianat Karya Iksaka Banu. *Jurnal Bapala*, 7(1), 1-7.

- Anantama, M. D., Widodo, S. T., & Setiawan, B. (2021). Hybridity and Mimicry in the Novel Pangeran dari Timur Iksaka Banu's Work. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understandin*, 8(1): 32-42.
- Ashcroft, B., Griffiths, G., dan Tiffin, H. (2003). *The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures*. London: Routledge.
- Endraswara, S. (2008). *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Farhana RM, F., & Aflahah, A. (2019). Kolonialisme dan Nasionalisme dalam Novel Bumi Manusia Karya Pramoedya Ananta Toer. *Ghancaran: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 1(1), 10-25. <https://doi.org/10.19105/ghancaran.v1i1.2946>
- Furqon, S, & Busro. (2020). Hibriditas Postkolonialisme Homi K. Bhabha dalam Novel *Midnight's and Children* Salman Rushdie. *Jentera: Jurnal Kajian Sastra* 9(1): 73-95.
- Groeneboer, K. (1999). Politik Bahasa pada Masa Hindia Belanda. *Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya*, 1(1), 32-48. <http://dx.doi.org/10.17510/wjhi.v1i1.279>
- Ilyas, A. (2018). Paradigma Masyarakat Tentang Dukun (Melacak Peran dan Posisi Dalam Struktur Sosial Politik dan Ekonomi Masyarakat). *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 6(2): 309-328. <https://doi.org/10.21274/kontem.2018.6.2.309-328>
- Imawati, D. N., Handayani, S., & Sumardi. (2017). The Intellectual's Contribution in the National Movement of in Indonesian 1908-1928. *Jurnal Historica*, 1(2), 277-292.
- Kartodirjo, S. (1990). *Ungkapan- Ungkapan Filsafat Sejarah Barat dan Timur*. Jakarta: Gramedia.
- Kirom, S. (2020). Memutus Kuasa Postkolonial di Indonesia dalam Perspektif Filsafat Sejarah Kritis. *Kamboti: Jurnal Sosial dan Humaniora* 1(1), 13-20. <https://doi.org/10.51135/kambotivol1iss1pp13-20>
- Lampert-Weissig, Lisa. (2010). *Medieval Literature and Postcolonial Studies. Medieval Literature and Postcolonial Studies*.
- Lasmiyati, L. (2012). Sejarah Uang Republik Indonesia Banten (Uridab) (1945-1949). *Patanjala: Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 4(3): 467-480. <http://dx.doi.org/10.30959/patanjala.v4i3.159>
- Loomba, A. (2003). *Kolonialisme atau Pascakolonialisme*. Yogyakarta: Bentang Budaya.

- Martins, M. (2017). Reflections on the Postcolonial Novel: an Interdisciplinary Approach. *International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)*, 4(2), 166–77.
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Triangulation The principle of triangulation comes from navigation, where th (Third Edition)*. United States of America: SAGE Publications
- Mustikawati, C. (2015). Pemahaman Emansipasi Wanita (Studi Hermeneutika Makna Emansipasi Wanita Dalam Pemikiran R. A. Kartini Pada Buku Habis Gelap Terbitlah Terang). *Jurnal Kajian Komunikasi* 3(1): 65–70.
- Restiyadi, A., & Nasoichah, C. (2017). Praktik Kolonialisme dalam Eksistensi Uang Kebon pada Perkebunan Sumatera Timur Abad Ke-19-20 (Sebuah Pendekatan Arkeologi Marxis). *Berkala Arkeologi Sangkhakala*, 20(1), 1–17. <http://sangkhakala.kemdikbud.go.id/>
- Rizki A, I. (2018). Self Assesment Sistem sebagai Dasar Pungutan Pajak di Indonesia. *Jurnal Al-‘Adl* 11(2): 81–88.
- Robbi, F. A. T., & Rachaju, R. D. K. (2018). Tayangan Mistik di Televisi: Budaya atau Pembodohan? *Jurnal Common*, 2(2), 105-110. <https://doi.org/10.34010/common.v2i2.1187>
- Schwarz, H., & Ray, S. (2005). *A Companion to Postcolonial Studies*. USA: Blackwell Publishing.
- Wahid, A. (2017). Dualisme Pajak di Jawa: Administrasi Pajak Tanah di Wilayah Vorstenlanden pada Masa Kolonial, 1915–1942. *Lembaran Sejarah*, 13(1), 28-47.
- Wardani, N. E., & Widyahening, C. E. T. (2020). Hybridity, Mimicry and Ambivalence of Female Characters in Indonesia: a Study from Postcolonial Novels. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12(1), 419–431.
- Wuryani, W. (2013). Pesona Karya Sastra dalam Pembelajaran Bahasa dan Budaya Indonesia. *Semantik: Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 2(2), 87–101. <https://doi.org/10.22460/semantik.v2i2.p87-101>
- Young, R. J. C. (2001). *Postcolonialism: An Historical Introduction*. London: Blackwell.
- Yulinda, N. A., Badriyanto, S. B., & Parwata, P. (2014). Konflik Lahan Pegaraman di Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Tahun 1975-1985. *Publika Budaya* 2(1), 69–77.

Zed, M. (2017). Warisan Penjajahan Belanda di Indonesia Pasca-Kolonial (Perspektif Perubahan dan Kesenambungan). *Diakronika*, 17(1), 90-103.
<https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17-iss1/18>